

Tim Editor:
Okto Irianto, Nikolaus Loy, Muhammad Rusdi,
Ludiro Madu, June Cahyaningtyas, & Suryo Wibisono

MENGAMANKAN LAUT:

Tata Ruang dan Keamanan Maritim



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA



PUSHANKAM
UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

[Handwritten signature]

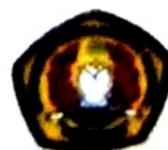
MENGAMANKAN LAUT : Tata Ruang dan Keamanan Maritim

Tim Editor:

**Okto Irianto, Nikolaus Loy, Muhammad Rusdi, Ludiro Madu,
June Cahyaningtyas, dan Suryo Wibisono**



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA**



**PUSHANKAM
UPN "VETERAN" Yogyakarta**

MENGAMANKAN LAUT : **Tata Ruang dan Keamanan Maritim**

Tim Editor:

**Okto Irianto, Nikolaus Loy, Muhammad Rusdi,
Ludiro Madu, June Cahyaningtyas, dan Suryo Wibisono**

xiv + 260 halaman; 15,5 x 23 cm

Cover: Agung Istiadi

Layout: Nana N

ISBN: 978-602-6733-24-5

Cetakan pertama: November 2017

Diterbitkan oleh

**PUSHANKAM UPN “Veteran” Yogyakarta dan Asisten Jasa Kemaritiman
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia**

Bekerjasama dengan

Penerbit Aswaja Pressindo

Jl. Plosokuning V/73, Minomartani,

Sleman, Yogyakarta

Telp. (0274) 4462377

Email: aswajapressindo@gmail.com

Website: www.aswajapressindo.co.id

MENUJU INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA MELALUI KERJASAMA MARITIM INDONESIA-JEPANG

Erna Kurniawati

President Joko Widodo of Indonesia and I reached agreement on pressing forward with cooperation to improve maritime safety and promote the development of remote island (PM of Japan, Shinzo Abe, 2016)

Pendahuluan

Ketika Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden tahun 2014 lalu, pasangan calon Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla mengusung program 9 agenda prioritas, yang disebutnya Nawa Cita (Sembilan Cita Cita) jika kelak terpilih. Pada agenda prioritas tersebut, Joko Widodo berniat mewujudkan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Hal yang menarik dari program Nawa Cita tersebut adalah, Joko Widodo memberi prioritas pada upaya mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai Negara Maritim. Berdasar catatan Komisi Pemilihan Umum, Jokowi-Jusuf Kalla menempatkan prioritas tersebut pada prioritas pertama dari Nawa Cita, yakni : Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan Negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim (http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf, diakses 1 Oktober 2017).

Setelah terpilihnya Joko Widodo (yang kemudian populer dengan nama Jokowi) sebagai Presiden, Jokowi berulang kali dalam berbagai kesempatan tampak berupaya untuk mewujudkan gagasan Indonesia

Menjadi Poros Maritim Dunia. Meski sebagian masyarakat memandang pesimis gagasan tersebut, dan menganggap hanya sebagai janji Jokowi untuk memenangkan Pemilu, namun Jokowi menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan agendanya tersebut. Tulisan ini akan membahas Kerjasama Maritim Indonesia-Jepang sebagai salah satu upaya pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Kerjasama Maritim Indonesia-Jepang ini menarik untuk diulas, mengingat kerjasama tersebut merupakan kerjasama maritim antar negara yang relatif awal dilakukan, sejak pemerintahan Jokowi meluncurkan gagasan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia.

Jokowi dan Kronologi Gagasan Poros Maritim

Visi Jokowi untuk membangkitkan kembali kejayaan Indonesia sebagai Negara Maritim, dengan berupaya mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia merupakan kebijakan yang sangat berani. Adapun upaya mewujudkan, dilakukan dengan menekankan pada sektor perdagangan, infrastruktur dan keamanan maritim. Keseriusan pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia ini ternyata bukan hanya janji kampanye semata, ini antara lain tampak dengan ditegaskannya kembali visi tersebut dalam East Asia Summit di Nay Pya Taw, Myanmar 13 November 2014.

Berdasar catatan Detik, dalam East Asia Summit yang dihadiri 18 Kepala negara ditambah Sekjen PBB Ban Ki Moon, Sekjen ASEAN Le Luong Minh, dan Presiden Asian Development Bank (ADB) Takehiko Nakao tersebut, presiden Jokowi menyampaikan gagasannya, yang disebutnya sebagai Doktrin Poros Maritim. Jokowi menganggap forum tersebut sebagai forum yang tepat untuk menyampaikan doktrin tersebut mengingat bagi Indonesia, East Asia Summit berperan penting bagi keamanan, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi di kawasan. Menurut Jokowi, Indonesia memandang pada abad XXI ini transformasi besar sedang terjadi, dimana pusat gravitasi geo ekonomi dan geo politik dunia sedang bergeser dari Barat ke Asia Timur, dimana negara negara Asia sedang bangkit. Dengan pertumbuhan ekonomi rata rata 7% per tahun, dengan total GDP sekitar 40 triliun USD, kawasan Asia Timur merupakan kawasan paling dinamis secara ekonomi, dimana sekitar

40 persen pe
com/berita/2
poros-mariti

Gagasa
sebetulnya
Indonesia C
dengan bul
Deklarasi
sebagai ne
pemerinta
sebagai ba

Seba

kepulauan
dari Saba
1957 yan
diantara
wilayah
presiden
dibidang

Jika

maritim
beberapa
lain, Ke
1000an,
Ternate
1521, c
dan ke
mengal
pada r
kejaya

Pa

Negara
pula, P
(Muna
menun
sebag

40 persen perdagangan dunia ada di kawasan ini. (<https://news.detik.com/berita/2747254/ini-doktrin-jokowi-di-east-asia-summit-tentang-poros-maritim-dunia>, diakses 30 September 2017)

Gagasan berani Jokowi tersebut tampak visioner, meskipun sebetulnya jika menilik sejarah, fakta bahwa beberapa kerajaan di Indonesia dulu dikenal kekuatan maritimnya sudah banyak didukung dengan bukti bukti sejarah. Demikian pula era pasca Kemerdekaan, Deklarasi Djuanda 1959 juga menunjukkan pengakuan Indonesia sebagai negara Kepulauan. Meskipun demikian namun justru pada pemerintahan Jokowi gagasan kembali ke jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa Maritim kembali mengemuka.

Sebagaimana diketahui, meskipun Indonesia adalah negara kepulauan terbesar didunia dengan 16.056 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, namun setelah Deklarasi Djuanda 1957 yang menyatakan bahwa laut Indonesia, termasuk laut sekitar, diantara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI, namun pada masa pemerintahan Suharto, dan presiden presiden sesudahnya, gagasan tersebut menyurut, kalau tidak bisa dibbilang 'menghilang'.

Jika kita menengok sejarah, kejayaan Indonesia dengan kekuatan maritimnya sebetulnya bukanlah hal baru. Maritimnews menelusur, beberapa kerajaan Nusantara dengan kultur peradaban maritim, antara lain, Kerajaan Kutai pada abad ke 4, kerajaan Sriwijaya tahun 600an-1000an, lalu kerajaan Majapahit di Jawa tahun 1293-1500, kerajaan Ternate (1257-sekarang), kerajaan Samudera Pasai tahun 1267-1521, dan kerajaan Demak tahun 1475-1458. Kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya tercatat sebagai kerajaan di Nusantara yang mengalami kejayaan karena karakter kemaritiman yang tertanam pada masyarakat. (<http://maritimnews.com/berikut-catatan-tentang-kejayaan-maritim-kerajaan-nusantara/> diakses 1 Oktober 2017).

Pada masa pasca Kemerdekaan, penetapan Indonesia sebagai Negara Maritim tampak dari Deklarasi Djuanda 1957. Demikian pula, Presiden RI pertama, Ir Sukarno melalui Musyawarah Nasional (Munas) Maritim I Surat Keputusan Presiden No 249 tahun 1964, menunjukkan komitmennya dengan menetapkan tanggal 23 September sebagai Hari Maritim Nasional. Pada masa pemerintahan Suharto,

Abdulrahman Wahid (Gus Dur), Megawati, B.J Habibie maupun Susilo Bambang Yudoyono (SBY), tampaknya tidak terlalu memperhatikan lebih terhadap sektor kemaritiman, setidaknya tidak menekankan pada Politik Maritim, namun pada era Joko Widodo gagasan untuk mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia justru menguat.

Dalam mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia pemerintahan Jokowi telah melakukan beberapa strategi. Hal ini dimungkinkan, setelah secara Perundangan, Dewan Perwakilan Rakyat melalui Sidang Paripurna DPR RI 29 September 2014 telah mensahkan RUU Kelautan menjadi UU Kelautan. Dengan demikian Undang Undang Kelautan ini menjadi payung hukum pemerintahan Indonesia untuk pengaturan pemanfaatan hasil laut secara komprehensif dan terintegrasi, sekaligus dapat menjadi penanda kebangkitan Indonesia menjadi Negara Maritim.

Secara kelembagaan, pada 27 Oktober 2014, pemerintahan Jokowi kemudian membentuk Kemenko Bidang Kemaritiman. Saat ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dijabat oleh Jenderal TNI (HOR)(Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan. Dengan dibentuknya berbagai perangkat dan lembaga tersebut, maka pemerintah semakin menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia dengan melalui berbagai strategi, termasuk melalui Diplomasi dan Kerjasama Internasional dengan negara lain. Mengingat Poros Maritim merupakan gagasan untuk konektivitas antar kepulauan di Indonesia, maka konektifitas menjadi krusial. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 16.056 pulau, menjadikan Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia, dan dengan garis pantai sepanjang 54.716 km, menjadikan Indonesia Negara dengan garis pantai terpanjang kedua, setelah Kanada. (Lihat gambar 1).

Gambar 1. Peta NKRI Terbaru 2017



Sumber: Badan Informasi Geospasial, dalam <https://www.goodnews from indonesia.id/ 2017/07/20/peta-indonesia-diperbarui-begini-perbedaannya-dengan-yang-peta-lama>, diakses 1 Oktober 2017

Konektifitas antar pulau sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, tampak dengan diumumkankannya doktrin, yang disebut pemerintahan Jokowi sebagai Doktrin Poros Maritim. Berdasar dokumen Kementrian Luar Negeri, doktrin yang terdiri dari 5 (lima) pilar ini justru pertamakali disampaikan presiden Jokowi pada East Summit di Nay Pya Taw, Myanmar 13 November 2014. Adapun kelima pilar tersebut terdiri, 1) membangun kembali budaya maritim Indonesia; 2) menjaga sumberdaya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama; 3) memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektifitas maritim, dengan membangun tol laut, deep sea port, logistik, dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim; 4) menerapkan diplomasi maritim melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim, dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara, dan bukan memisahkan.; 5) membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggungjawab menjaga keselamatan pelayaran dan

keamanan maritim. (<http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi-Deklarasikan-Indonesia-Sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx>, diakses 1 Oktober 2017)

Keseriusan pemerintah Jokowi dalam mewujudkan poros maritim Dunia tampak dengan dikembangkannya 5 pilar tersebut menjadi legal formal dengan mengembangkannya menjadi 7 Pilar Poros Maritim Dunia. Berdasar catatan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Ketujuh Pilar Poros Maritim yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16/2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia dan Perikanan meliputi : 1) Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia; 2). Diplomasi Maritim; 3) Budaya Bahari; 4) Perlindungan Ruanglaut dan Perlindungan Lingkungan Laut; 5) Ekonomi Infrastruktur dan Peningkatan Kesejahteraan; 6) Tata kelola dan Kelembagaan Kelautan; 7) Pertahanan, keamanan, Penegakan Hukum dan Keselamatan Di Laut. (http://www.bkipm.kkp.go.id/bkipmnew/public/files/regulasi/PERPRES_NO_16_2017.pdf, diakses 1 Oktober 2017)

Tidak berhenti disitu, upaya legal formal untuk upaya Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum di Laut, sebagai pendukung pembentukan Poros Maritim Dunia dilakukan pula dengan dikeluarkannya peta baru NKRI. Kemenko Bidang Kemaritiman, pada 14 Juli 2017 lalu, secara resmi telah mengeluarkan peta baru NKRI. Berikut gambar Peta lama NKRI, sedang Peta Baru NKRI, dapat dilihat pada gambar 1 diatas.

keamanan maritim. (<http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi-Deklarasikan-Indonesia-Sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx>, diakses 1 Oktober 2017)

Keseriusan pemerintah Jokowi dalam mewujudkan poros maritim Dunia tampak dengan dikembangkannya 5 pilar tersebut menjadi legal formal dengan mengembangkannya menjadi 7 Pilar Poros Maritim Dunia. Berdasar catatan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Ketujuh Pilar Poros Maritim yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16/2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia tersebut meliputi : 1) Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia; 2). Diplomasi Maritim; 3) Budaya Bahari; 4) Perlindungan Ruanglaut dan Perlindungan Lingkungan Laut; 5) Ekonomi Infrastruktur dan Peningkatan Kesejahteraan; 6) Tata kelola dan Kelembagaan Kelautan; 7) Pertahanan, keamanan, Penegakan Hukum dan Keselamatan Di Laut. (http://www.bkipm.kkp.go.id/bkipmnew/public/files/regulasi/PERPRES_NO_16_2017.pdf, diakses 1 Oktober 2017)

Tidak berhenti disitu, upaya legal formal untuk upaya Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum di Laut, sebagai pendukung pembentukan Poros Maritim Dunia dilakukan pula dengan dikeluarkannya peta baru NKRI. Kemenko Bidang Kemaritiman, pada 14 Juli 2017 lalu, secara resmi telah mengeluarkan peta baru NKRI. Berikut gambar Peta lama NKRI, sedang Peta Baru NKRI, dapat dilihat pada gambar 1 diatas.

Gambar 2. Peta Lama NKRI



Sumber: Badan Informasi Geospasial, dalam <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/07/20/peta-indonesia-diperbarui-begini-perbedaannya-dengan-yang-peta-lama>

Dikeluarkannya Peta Baru NKRI tentu berimplikasi luas. Good News from Indonesia mencatat bahwa Deputy Bidang Kedaulatan Maritim, Arif Havas Oegroseno menjelaskan setidaknya ada 5 perubahan yang terjadi dengan adanya Peta Baru tersebut, dan ini akan berimplikasi pada perbatasan laut. Adapun implikasi tersebut adalah 1) Perubahan batas dengan Palau; 2) Perubahan batas Indonesia dengan Filipina di laut Sulawesi; 3) Perubahan nama Laut Natuna Utara; 4) Perubahan Zona Ekonomi Eksklusif di Selat Malaka; dan 5) Perubahan batas laut teritorial di perbatasan Selat Riau. (<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/07/20/peta-indonesia-diperbarui-begini-perbedaannya-dengan-yang-peta-lama>, diakses 1 Oktober 2017).

Terkait hubungan antar negara, dibuatnya Peta Baru Indonesia ini, terutama perubahan nama Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Riau menjadi Natuna Utara tak pelak telah menimbulkan insiden, terutama dengan China. Sindonews memberitakan, bahwa China melakukan protes keras, karena dengan peta Baru yang diluncurkan pemerintah Indonesia tersebut, serta penamaan Natuna Utara menimbulkan overlapped dengan konsep 9 Dash Line (9DL) China

atau bersinggungan dengan klaim China yang menganggap wilayah tersebut sebagai perairan tradisionalnya. Pemerintah China secara resmi tertanggal 25 Agustus 2017 telah mengirim catatan resmi ke Kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing. (<https://international.sindonews.com/read/1236125/40/china-tuntut-indonesia-batalkan-penamaan-laut-natuna-utara-1504375223>, diakses 3 Oktober 2017)

Namun hal ini tidak menyurutkan keseriusan pemerintah Indonesia yang lantas secara resmi mendaftarkan penamaan baru Natuna Utara tersebut ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), khususnya ke Badan Hidrografik Internasional. Namun disisi lain, hal ini bukan tidak mungkin ke depan justru akan mendorong kerjasama Indonesia dengan pihak lain yang mempunyai masalah yang sama dengan China. Sebagaimana diketahui, China mempunyai masalah klaim Tumpang Tindih Laut China Selatan. Setidaknya terdapat 6 (enam) negara yang terlibat dalam klaim tersebut, yakni China, Taiwan, Vietnam, Philipina, Brunei dan Malaysia. Meskipun saat ini sedang digarap Code of Conduct terkait pengelolaan Laut China Selatan, serta sudah adanya hasil dari Mahkamah Arbitrase di Den Hague yang memenangkan Filipina dalam konflik Laut China Selatan pada bulan Juli 2016 lalu, namun China tidak mengakui hasil tersebut. Dengan demikian, ada kemungkinan konflik terkait klaim tumpang tindih di Laut China Selatan masih akan berlanjut. Bukan tidak mungkin pula, penamaan Laut Natuna Utara oleh Indonesia akan menambah kompleksitas masalah tersebut, jika tidak segera ditangani. Untuk itu menjadi penting bagi Indonesia memberi penjelasan penamaan laut natuna Utara tersebut kepada pemerintah China, jika tidak ingin menambah komplikasi yang tidak perlu.

Ketika Indonesia sedang berpotensi konflik dengan China terkait penamaan laut Natuna Utara, sebaliknya Jepang justru menangkap peluang untuk melakukan kerjasama maritim dengan Indonesia. Kesigapan Jepang tidak dipungkiri, setidaknya terkait kepentingan Jepang untuk memelihara perdamaian kawasan Asia Pasifik, termasuk keamanan Laut China Selatan yang merupakan jalur perdagangan (Sea Lines of Communication/SLOC) Jepang, kemungkinan juga karena kejelian Jepang menangkap peluang terkait ambisi pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Kerjasama Maritim Indonesia- Jepang

Kerjasama Indonesia-Jepang di berbagai bidang sebetulnya sudah lama terjalin, terutama sejak munculnya Doktrin Fukuda tahun 1977 yang menjadi dasar kerjasama Jepang dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara umumnya. Dalam bidang ekonomi misalnya, eratnya kerjasama Indonesia- Jepang tampak dari seringnya Indonesia menjadi salah satu negara resipien terbesar bantuan resmi pemerintah Jepang (*Official Development Assistance/ODA*), baik dalam bentuk grant, technical assistance, dan terutama loan. Kerjasama dalam bidang ekonomi lain juga ada dalam skema kerjasama IJ-EPA (*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*). Di ASEAN, dimana Indonesia sebagai negara terbesar yang berpengaruh di ASEAN, terdapat kerjasama Jepang-ASEAN bersama Korea Selatan dan China dalam skema ASEAN+3 . Dalam pengelolaan keamanan Selat Malaka, Jepang juga mempunyai kerjasama dengan Indonesia, Malaysia dan Singapura, terutama dalam penanganan perompakan di Selat Malaka yang masuk dalam jalur perdagangan (SLOC) Jepang. Demikian pula dalam pemberantasan terorisme, Jepang juga memberi banyak bantuan ke pemerintah Indonesia untuk menanggulangi masalah terorisme. Jepang juga termasuk mendukung Indonesia untuk mewujudkan good governance dan demokratis. Belum lagi kerjasama pengiriman tenaga kerja Indonesia, terutama tenaga perawat ke Jepang, dan berbagai bentuk kerjasama lain.

Namun demikian, meski telah hampir 60 tahun menjalin berbagai kerjasama, baru pada Desember 2016 lalu, Jepang dan Indonesia sepakat melakukan kerjasama maritim dengan membentuk *Indonesia-Japan Maritime Forum* (IJMF). IJMF yang ditandatangani Menteri Koordinator Maritim, Luhut Pandjaitan dan Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida pada 21 Desember 2016 tersebut dibentuk melalui *Memorandum of Cooperation to Establish Indonesia-Japan Maritime Forum*. Forum Maritim Jepang-Indonesia bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama Angkatan Laut Indonesia-Jepang. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Jepang berkomitmen membantu pembangunan pelabuhan dan pembangunan pulau-pulau terpencil, serta meningkatkan kemampuan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan maritimnya.

Tempo mencatat, cakupan kerjasama IJMF meliputi bidang keamanan maritim dan keselamatan laut, pembangunan ekonomi kemaritiman, pembangunan infrastruktur kemaritiman serta pendidikan dan pelatihan kemaritiman (<http://bisnis.tempo.co/read/829650/ri-dan-jepang-bentuk-indonesia-japan-maritime-forum#QA4jO4e03IGZ8Zhz.99>, diakses 29 September 2017). Luasnya bidang kerjasama maritim kedua negara, memberi peluang besar terhadap pengembangan kerjasama tersebut ke depan. Kerjasama maritim kedua Negara berlanjut dengan kunjungan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ke Indonesia pada bulan Januari tahun berikutnya. Label "prioritas tertinggi" pada kerjasama maritime kedua Negara, menunjukkan pentingnya kerjasama tsb.

Ada asumsi, bahwa adanya kesamaan kepentingan, membuat negara melakukan kerjasama. Kerjasama dilakukan, karena tujuan akhirnya adalah untuk memenuhi kepentingan nasional. Namun demikian, dari perspektif Neo Liberalis, kerjasama dan interdependensi akan mendorong kearah perdamaian, karena negara negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut berkepentingan untuk memelihara perdamaian, demi kelancaran hubungan yang resiprokal diantara kedua negara serta mencegah anarki. Goldstein (2012, hal 66) menyebutkan bahwa "*states are unitary actors rationally pursuing their self interest in a system of anarchy. State achieve cooperation because it is in their interest to do so, and they can learn to use institutions to ease the pursuit of mutual gains and the reduction of possibilities for cheating or taking advantage of another state*".

Dari sudut pandang ini, maka kerjasama maritim Indonesia-Jepang dalam skema IJMF dapat dipandang sebagai salah satu upaya diplomasi maritim Indonesia untuk mewujudkan Poros Maritim Indonesia, atau dengan kata lain, merupakan implementasi dari pilar Poros Maritim ke 2 Perpres No 16 tahun 2017. Disepakatinya IJMF memberi banyak peluang bagi Indonesia untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia dengan memperkuat kerjasama dengan Jepang. Dalam bidang kerjasama Angkatan Laut Indonesia-Jepang, masih terbuka peluang lebar, apalagi berdasar Liputan 6 Global, dengan adanya skema Japan-Indonesia 2+2 Meeting yang melibatkan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara, yang dimulai

sejak bulan
memperlan
Peluang pe
juga semak
Jakarta, Hi
Self Defen
di akade
read/2521
dan-keam
bidang lai
personil, MSDF, s
lain dari

Berco
Energi,
kelesuan
hingga S
USD 4.9
sebelum
pemban
termasu
(<http://e>
jepang.
4 Okto

M
rangka
menda
infrast
disepa
Kelau
Perda
Septe
untuk
fasili
terlu
Natu

sejak bulan Desember 2016 lalu, merupakan awal yang baik untuk memperlancar komunikasi dan peningkatan kerjasama kedua negara. Peluang pertukaran mahasiswa, terutama mahasiswa Angkatan laut juga semakin terbuka. Menurut Atase Pertahanan Kedutaan Besar di Jakarta, Hiroshi Komiya, saat ini baru 1 (orang) mahasiswa *Maritime Self Defence Force* (MSDF) yang mengikuti pertukaran mahasiswa di akademi Militer di Indonesia. (<http://global.liputan6.com/read/2521571/indonesia-jepang-tingkatkan-kerja-sama-pertahanan-dan-keamanan>, diakses 4 Oktober 2017). Kerjasama bisa diperluas ke bidang lain, misalnya pelatihan bagi tehnisi armada laut, pertukaran personil, maupun latihan bersama TNI dan SDF, terutama TNI AL dan MSDF, seperti sudah dilakukan di Padang, bersama Angkatan Laut lain dari seluruh dunia .

Berdasar data Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, meningkatnya investasi Jepang di Indonesia di tengah kelesuan ekonomi dunia juga menggembirakan. Bulan Januari hingga September 2016 misalnya, Jepang telah melakukan investasi USD 4.494, angka ini merupakan 2 kali lipat jika dibanding tahun sebelumnya. Demikian pula komitmen Jepang untuk membantu pembangunan pelabuhan dan pembangunan pulau-pulau terpencil, termasuk diantaranya rencana pembangunan pelabuhan Patimban (<http://ebtke.esdm.go.id/post/2017/01/16/1523/> indonesia.dan.jepang.hasilkan.sejumlah.kesepakatanyang.sangat.produktif, diakses 4 Oktober 2017).

Maritimeneews mencatat, sebagai tindak lanjut IJMF, serta dalam rangka menyambut 60 tahun kerjasama Indonesia-Jepang tahun 2018 mendatang, Jepang berkomitmen untuk membantu pembangunan infrastruktur di pulau-pulau terpencil Indonesia, seperti yang sudah disepakati sebelumnya. Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Penasehat Khusus Perdana Menteri Jepang, Iroto Izumi di Gedung KKP, pada 6 September 2017 lalu sepatat terhadap komitmen pemerintah Jepang untuk memberi hibah pembangunan lokasi fisheries community atau fasilitas perikanan terintegrasi di 6 lokasi dan coastal radar di 6 pulau terluar Indonesia dan promosi perikanan di Indonesia, yakni di Sabang, Natuna, Morotai, Saumlaki, Moea dan Biak dengan menggunakan

tehnologi dari Jepang. Komitmen diwujudkan berupa pembangunan fasilitas perikanan, keamanan laut, termasuk free navigation di kawasan laut Indonesia. (<https://maritimeneews.id/indonesia-jepang-tingkatkan-kerjasama-kelautan-perikanan/>, diakses 1 Oktober 2017).

Selain itu, Indonesia dan Jepang juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama dengan investasi dan perdagangan produk perikanan; pemberantasan *IUU Fishing and Fisheries crimes*, dan pengembangan ikan di bidang kelautan dan perikanan; serta penelitian di bidang kelautan dan perikanan. Berbagai bentuk kerjasama diatas merupakan cakupan kerjasama IJMF yang sepakat akan meliputi bidang keamanan maritim dan keselamatan laut, pembangunan ekonomi kemaritiman, pembangunan infrastruktur kemaritiman serta pendidikan dan pelatihan kemaritiman serta meningkatkan kemampuan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan maritimnya.

Terkait pendidikan dan pelatihan kemaritiman, selain bisa dilakukan dengan pertukaran MSDF dan TNI AL, dapat juga dilakukan dengan bentuk pendidikan diplomasi maritim. Sebagai negara yang baru mendeklarasikan diri sebagai Poros Maritim, bisa dimahfumi jika Indonesia masih belum mempunyai desain yang mapan dalam diplomasi maritim. Padahal jalur diplomasi sebagai alat komunikasi dan negosiasi politik sangat krusial dalam mencapai kepentingan nasional. Sinergi antar lembaga atau aktor yang terlibat merupakan suatu keharusan.

Kompas mencatat, belum sinkronnya antar departemen antara lain tampak dalam menyikapi protes China terhadap penamaan Natuna Utara. Sikap Kemenko Kemaritiman yang tidak bersedia menanggapi protes China tampak dari pernyataan Menko kemaritiman Luhut M Pandjaitan yang menyatakan: ya, kami tidak terlalu menanggapi. Saya sudah komunikasi dengan mereka. Tidak terlalu masalah. Menurut Luhut, pemerintah tidak ingin menciptakan persoalan baru. Apalagi Indonesia sedang melakukan kerjasama ekonomi dengan China. Namun Luhut menegaskan, bahwa Indonesia tidak mengakui nine dash line yang menjadi dasar klaim China atas Laut China Selatan. (<http://nasional.kompas.com/read/2017/07/25/00424831/indonesia-enggan-tanggapi-protes-china-soal-penamaan-laut-natuna-utara>, diakses 4 Oktober 2017). Padahal China menganggap perubahan nama

ZEE di utara kepulauan Riau menjadi Natuna Utara, yang oleh Arif Havas Oegroseno dikarenakan penamaan berdasar industri migas, yang telah lebih dulu menggunakan tersebut, dianggap Departemen luar negeri China melalui juru bicara kementerian Luar Negerinya, sebagai 'tidak kondusif'.

Menanggapi hal tersebut, CNN Indonesia memberitakan bahwa terkait pendaftaran nama Natuna Utara di PBB, khususnya di Organisasi Hidrografik Internasional, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Armanatra Nasir menyatakan Kemlu RI hanya merujuk pernyataan Menko Kemaritiman Luhut M Pandjaitan beberapa waktu lalu. Luhut saat itu menyatakan bahwa penamaan Natuna Utara hanya terjadi di kedaulatan RI, dan tidak menyentuh wilayah Negara lain, apalagi Laut China Selatan. (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170720172204-106-229239/dipotes-china-ri-daftarkan-nama-laut-natuna-utara-ke-pbb/>, diakses 1 Oktober 2017).

Dari kasus tersebut, tampak bahwa sinkronisasi diplomasi maritim antar lembaga yang terlibat, merupakan urgensi yang harus segera dikelola dengan baik. Indonesia tampaknya belum mempunyai desain yang mapan dalam membuat formula diplomasi maritim yang tepat. Dalam National Seminar on Maritime Diplomacy yang diselenggarakan di Hotel JS Luwansa Jakarta pada 25 Januari 2017 lalu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengajukan Formulasi Diplomasi yang modern dan kreatif bagi Diplomasi Maritim Indonesia, yang menurut LIPI bisa dibangun dengan tiga cara. *Pertama*, perluasan cakupan isu yang selama ini menjadi fokus dari diplomasi maritim. *Kedua*, melibatkan aktor non-negara, baik pihak swasta atau pelaku ekonomi maupun masyarakat sipil. Dalam hal ini, Indonesia perlu mengevaluasi praktik diplomasi yang cenderung *state-centric*. *Ketiga*, di dalam meningkatkan diplomasi maritim, koordinasi antar lembaga di sektor maritim berperan penting. Dengan ini Indonesia bisa memperkuat identitas sebagai negara maritim (<http://m.metrotvnews.com/internasional/asia/Rb116v2N-penguatan-diplomasi-maritim-yang-melindungi-kepentingan-indonesia>)

Lebih lanjut, melalui Pusat Penelitian Politik, LIPI menyatakan bahwa, LIPI sedang bekerjasama dengan Jepang untuk melakukan riset bersama terkait isu diplomasi maritim, dengan harapan ke

depan Indonesia akan memiliki diplomasi maritim yang baik. Kebijakan diplomasi yang baik akan memudahkan upaya Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim. Hal ini dianggap penting, karena dengan diplomasi maritim yang baik, bila mempertimbangkan kemampuan intelektual untuk mengidentifikasi isu terkait keamanan maritim, manajemen kelautan, dan investasi maritim untuk menjaga kedaulatan (<http://lipi.go.id/berita/diplomasi-maritim-kunci-jaga-kedaulatan-bangsa/17493>, diakses 1 Oktober 2017). Kerjasama yang dilakukan LIPI dan pemerintah Jepang dalam pengembangan diplomasi maritim, merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Jepang dalam bekerjasama dengan Indonesia yang sedang gencar menuju Poros Maritim Dunia, dengan memberi hibah penelitian dan pendidikan maritim. Perguruan Tinggi, maupun lembaga non pemerintah, dapat menangkap peluang tersebut, terutama sebagai bentuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kemaritiman.

Banyaknya kesepakatan pemerintah Indonesia dan Jepang, terutama terkait komitmen Jepang bagi pengembangan sektor maritim di Indonesia, tidak terbantahkan. Komitmen Jepang, sekaligus juga menunjukkan bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang strategis bagi Jepang. Ini antara lain tampak dari kunjungan Jepang ke negara Philipina, Viet Nam dan Australia, selain ke Indonesia pada waktu yang hampir bersamaan dan mencapai berbagai kesepakatan.

Kesimpulan

Kerjasama maritim Indonesia-Jepang dalam skema Indonesia – Japan Maritime Forum (IJMF), dengan demikian menjadi sangat strategis bagi kedua negara. Kerjasama ini juga selain bertujuan untuk memperkuat kerjasama maritim kedua negara, sekaligus dapat mendukung upaya pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Masih banyak peluang kerjasama maritim yang bisa dilakukan kedua negara, diantaranya pengembangan pulau –pulau terpencil di Indonesia , sesuai komitmen pemerintah Jepang, serta pengembangan diplomasi maritim, dan berbagai riset kemaritiman yang pada akhirnya dapat mendukung Indonesia menjadi negara Poros Maritim Dunia .

Daftar Pu
Goldstein, J
Brief
Peraturan
Indo
files
201
RI dan J
bisn
japa
Sep
Ini doktri
htt
di-
Se
Sahat M
Ke
te
O
Peta In
L
p
p
Diplom
b
c
Pengu
Jalan

Daftar Pustaka

Goldstein, Joshua D & Jon C. Pevehouse(2012), *International Relations Brief* 6th ed, Boston: Pearson.

Peraturan Presiden RI No 16 tahun 2017, Tentang Kebijakan kelautan Indonesia, http://www.bkipm.kkp.go.id/bkipmnew/public/files/regulasi/PERPRES_NO_16_2017.pdf, diakses 1 Oktober 2017

RI dan Jepang Bentuk Indonesia Japan Maritime Forum. <https://bisnis.tempo.co/read/829650/ri-dan-jepang-bentuk-indonesia-japan-maritime-forum#QA4jO4e03IGZ8Zhz.99>, diakses 29 September 2017

Ini doktrin Jokowi di East Asia Summit tentang Poros Maritim Dunia, <https://news.detik.com/berita/2747254/ini-doktrin-jokowi-di-east-asia-summit-tentang-poros-maritim-dunia>, diakses 30 September 2017.

Sahat M.P, Sinurat, Berikut Catatan Tentang Kejayaan Maritim Kerajaan Nusantara.<http://maritimnews.com/berikut-catatan-tentang-kejayaan-maritim-kerajaan-nusantara/>, diakses 1 Oktober 2017

Peta Indonesia Diperbarui, Begini Perbedaannya Dengan yang Peta Lama, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/07/20/peta-indonesia-diperbarui-begini-perbedaannya-dengan-yang-peta-lama>, diakses 1 Oktober 2017

Diplomasi Maritim Kunci Jaga Kedaulatan Bangsa, <http://lipi.go.id/berita/diplomasi-maritim-kunci-jaga-kedaulatan-bangsa/17493> diakses 1 Oktober 2017

Penguatan Diplomasi Maritim Yang melindungi Kepentingan Indonesia, <http://m.metrotvnews.com/internasional/asia/Rb116v2N-penguatan-diplomasi-maritim-yang-melindungi-kepentingan-indonesia>, diakses 1 Oktober 2017

Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, mandiri dan Berkepribadian, Visi Misi dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla

2014, http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf, diakses 1 Oktober 2017.

China Tuntut Indonesia batalkan Penamaan Laut Natuna Utara, <https://international.sindonews.com/read/1236125/40/china-tuntut-indonesia-batalkan-penamaan-laut-natuna-utara-1504375223> diakses 3 Oktober 2017

Indonesia Enggan Tanggapi Protes China Soal Penamaan laut Natuna Utara, <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/25/00424831/indonesia-enggan-tanggapi-protes-china-soal-penamaan-laut-natuna-utara> diakses 3 Oktober 2017

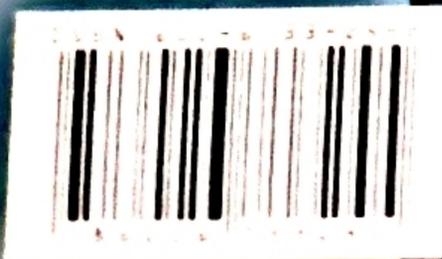
Asia Security News, <http://asiasecuritynews.com/7133/japan-and-indonesia-to-deepen-defence-ties/> diakses 4 Oktober 2017

Indonesia-Jepang Tingkatkan Kerjasama Pertahanan dan Keamanan, <http://global.liputan6.com/read/2521571/indonesia-jepang-tingkatkan-kerja-sama-pertahanan-dan-keamanan> diakses 4 Oktober 2017

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, <http://ebtke.esdm.go.id/post/2017/01/16/1523/indonesia.dan.jepang.hasilkan.sejumlah.kesepakatan.yang.sangat.produktif> diakses 4 Oktober 2017

Indonesia Jepang Tingkatkan Kerjasama Kelautan Perikanan, <https://maritimnews.id/indonesia-jepang-tingkatkan-kerjasama-kelautan-perikanan/>, diakses 4 Oktober 2017

Presiden Jokowi Deklarasikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia, <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi-Deklarasikan-Indonesia-Sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx>, diakses 1 Oktober 2017



Diterbitkan oleh:
PUSHANKAM UPN 'Veteran' Yogyakarta
dan Asisten Jasa Kemaritiman,
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa,
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia